

LURAH GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2021

## TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a.  | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ; |
|  | b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 yang tersusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu ditanggungjawabankan pelaksanaannya;  |
|  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal )Tahun Anggaran 2020; |
| Mengingat:  | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang –undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ; |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 ); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); |
|  | 10 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuanagan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193 ) ; |
|  | 11 | Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ( Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);  |
|  | 12. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa ( Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul Nomor 7Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7 ); |
|  | 14. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul Nomor 6Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6 ); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51 ); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 18. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63 ); |
|  | 19. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32 ); |
|  | 20. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);  |
|  | 21. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3); |
|  |  22. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Girimulyo(Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9 ). |
|  |  23. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa ( Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3); |
|  |  24. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 4); |
|  |  25. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 7 ); |
|  |  26. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa Girimulyo(Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9 ). |
|  | 27 | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 12 )sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020Nomor 7). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

Dan

LURAH GIRIMULYO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
	* 1. Pendapatan Asli Kalurahan Rp 272.184.825,00
		2. Transfer Rp 2.041.047.825,00
		3. Pendapatan Lain Lain Rp 6.391.667,00

 +

Jumlah Pendapatan Kalurahan Rp 2.319.624.317,00

1. Belanja Kalurahan
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp 988.976.775,00
3. Bidang Pembangunan Rp 1.026.573.850,00
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 12.481.100,00
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 41.059.650,00
6. Bidang Penanggulangan Bencana ,Keadaan

 Darurat dan Mendesak Kalurahan Rp 290.305.000,00

 +

Jumlah Belanja Rp 2.359.396.375,00

 Surplus/Defisit (Rp 39.772.058,00)

1. Pembiayaan Kalurahan :
2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 107.103.197,00
3. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

 - -

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 107.103.197,00

SILPA Tahun berjalan Rp. 67.331.139.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

* + 1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
		2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
		3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral dan Program daerah lainnya yang masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
		4. Lampiran IV : Laporan Mutasi Aset Tahun 2020

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di GIRIMULYO

pada tanggal 25 Januari 2021

### LURAH GIRIMULYO,

SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo

pada tanggal 25 Januari 2021

####  CARIK GIRIMULYO,

 P A R Y A N I

LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 1